

2020

**SALAM
SEHAT**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
SDM KESEHATAN**

**Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020 merupakan gambaran kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun 2020.

Penyusunan RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2020. RKT ini akan menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Jakarta, 13 Desember 2019

+ Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan



dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

NIP 196405201991031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Manfaat	1
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sasaran	2
1.6. Landasan Penyusunan	2
1.7. Sistematika Penulisan	3
Bab II. Situasi Organisasi dan Situasi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	4
2.1 Kelembagaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	4
2.3 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah	15
Bab III. Arah Kebijakan	17
3.1 Visi dan Misi.....	12
3.2 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	17
3.4 Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan	17
3.5 Rencana Aksi Kegiatan Pusren-Gun SDM Kesehatan Tahun 2020-2024	18
3.6 Rencana Kinerja Tahun 2020	18
3.7 Perjanjian Kinerja 2020	19
3.8 Kebutuhan Anggaran	20
Bab IV. Monitoring dan Evaluasi	22
4.1 Monitoring	22
4.2 Evaluasi	22
Bab V. Penutup	22
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Penutup	23
Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

1.2. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020 adalah.

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2020.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan pada tahun 2020
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan pada tahun 2020

1.3. Manfaat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024. RKT adalah

upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2020. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2020.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Pusren-Gun SDM meliputi kegiatan yang diusulkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Kegiatan tersebut akan dijabarkan pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2020-2024.

1.5. Sasaran

Sasaran Buku RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2019 meliputi :

1. Internal Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan meliputi struktural, dan Pejabat Fungsional, dan Aparatur sipil Negara lainnya
2. Lintas Program di Kementerian Kesehatan
3. Lintas Sektor terkait Pelaksanaan akuntabilitas.

1.6. Landasan Penyusunan

RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut :

1. Landasan Ideal Pancasila

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan Negara dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa

2. Landasan Konstitusi : UUD 1945

UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.

3. Landasan Operasional :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.

1.7. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar
- 2. Daftar Isi
- 3. BAB I. Pendahuluan
- 4. BAB II. Situasi Organisasi dan Isu Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5. BAB III. Arah Kebijakan
- 6. BAB IV. Monitoring dan Evaluasi
- 7. BAB VI. Penutup
- 8. Lampiran

BAB 2
SITUASI ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

2.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan bagian keempat pasal 772, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; dan pelaksanaan administrasi Pusat.

2.2 Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
 - b. Subbidang Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan
2. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri;
 - a. Subbidang Pendayagunaan SDM Daerah Khusus
 - b. Subbidang Pendayagunaan SDM Nasional
3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri;
 - a. Subbidang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri
 - b. Subbidang Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing
4. Subbagian Tata Usaha; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.1 Bidang Perencanaan SDM Kesehatan

1. Tujuan

Perencanaan SDM Kesehatan bertujuan diperolehnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan dan rencana pengembangan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan pokok perencanaan SDM Kesehatan ialah meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan.

a. Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan kebutuhan SDM yang dihasilkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDM	5 Dokumen
	a) Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDM tahunan yang dihasilkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDM	3 Dokumen
	b) Jumlah provinsi yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan perencanaan SDM	Jumlah provinsi yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perencanaan SDM	15 Dokumen
2.	Jumlah lulusan pendidikan Dokter Spesialis yang didayagunakan	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan di rumah sakit pemerintah	700 orang
	a) Terlaksananya kegiatan operasional Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) selama 12 bulan	Terlaksananya kegiatan operasional KPDS meliputi kegiatan persiapan penempatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan honorarium dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	1 Dokumen

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
		terkait.	
	b) Terlaksananya visitasi dan revisitasi ke 800 RS pemerintah	Jumlah RS Pemerintah yang dilakukan visitasi dan re visitasi dalam rangka penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis (PGDS)	160 Lokasi
	c) Terlaksananya pendaftaran/rekrutmen peserta pendayagunaan dokter spesialis sebanyak 700 orang	Terlaksananya kegiatan pendaftaran/rekrutmen peserta pendayagunaan dokter spesialis bagi 700 orang, yang meliputi verifikasi data lulusan, analisa RS yang menjadi lokasi penempatan PGDS dan penentuan calon peserta PGDS, serta kegiatan penguatan dukungan fakultas kedokteran dan pemangku kepentingan lainnya.	700 orang
	d) Terlaksanakan pemberangkatan peserta pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung non ASN ke RS Pemerintah sebanyak 400 orang pertahun dan pemulangan sebanyak 400 orang pertahun	Terlaksanakan pemberangkatan peserta pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung non ASN ke RS pemerintah sebanyak 400 orang pertahun dan pemulangan peserta sebanyak 400 orang pertahun	800 orang
3.	Jumlah lulusan pendidikan Dokter Spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan di rumah sakit pemerintah di wilayah papua dan papua barat	40 Orang
	a) Terlaksananya visitasi dan revisitasi ke 49	Jumlah RS Pemerintah yang dilakukan visitasi dan	9 Lokasi

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	RS pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat	re visitasi dalam rangka penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis (PGDS)	
	b) Terlaksanakan pemberangkatan peserta pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung non ASN sebanyak 40 orang pertahun ke RS pemerintah dan pemulangan sebanyak 40 orang di wilayah Papua dan Papua Barat	Terlaksanakan pemberangkatan peserta pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung nonAsn sebanyak 40 orang pertahun ke RS pemerintah dan pemulangan sebanyak 40 orang di wilayah Papua dan Papua Barat	80 Orang
4.	Jumlah Rancangan Regulasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan di Kab/Kota	1 Dokumen
	Jumlah dokumen monitoring kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Kab/Kota	Dokumen Monitoring kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Kab/Kota	1 Dokumen

b. Perencanaan pengembangan SDM Kesehatan.

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan kebutuhan SDMK yang dihasilkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDMK	5 Dokumen
	a) Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengembangan dan perencanaan	2 Dokumen

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
		pendayagunaan SDM kesehatan yang dihasilkan untuk kurun waktu satu tahun	
	b) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan SDM	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengembangan SDM kesehatan yang dihasilkan untuk kurun waktu satu tahun	1 Dokumen
	c) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pendayagunaan SDM	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengembangan pendayagunaan SDM kesehatan yang dihasilkan untuk kurun waktu satu tahun	1 Dokumen

2.2.2 Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri

1. Tujuan

Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

2. Sasaran

a. Pendayagunaan SDM Kesehatan Nasional

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah Dokter yang melaksanakan Internsip	Proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga,	12.000 Orang

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
		dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan	
	a) Jumlah Dokumen Kebijakan PIDI Kesehatan	Dokumen Kebijakan teknis PIDI	1 Dokumen
	b) Jumlah Wahana PIDI	Fasyankes baik RS & PKM yang dipakai dalam wahana PIDI	40 Lokasi
	c) Jumlah Dokter Pendamping	Dokter pendamping yang mengikuti pelatihan	360 Orang
	d) Jumlah Peserta PIDI	Dokter Internsip yang mengikuti Pembekalan dalam PIDI	12.000 Orang
	e) Jumlah Peserta PIDI	Dokter Internsip yang mengikuti Pelaksanaan PIDI	12.000 Orang
	f) Terlaksananya Monev PIDI	Jumlah Provinsi yang telah dilaksanakan Monev PIDI	40 Provinsi
	g) Terlaksananya Workshop PIDI / Raker KIDI	Jumlah Provinsi yang telah mengikuti Workshop PIDI / Raker KIDI	34 Provinsi
	h) Terlaksananya Manajemen KIDI	Dokumen Pelaksanaan Manajemen KIDI	12 Dokumen
	i) Terlaksananya Pengelolaan Operasional PIDI	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Operasional PIDI	12 Dokumen

b. Pendayagunaan SDM Kesehatan Daerah Khusus

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan yang baru ditempatkan dan peserta yang berakhir masa tugasnya, pada penugasan khusus secara tim	1.356 Orang
	a) Pelaksanaan Persiapan dan	Kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan	1 Dokumen

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Persiapan dan Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	
	b) Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	c) Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Kegiatan Rekrutmen dan Seleksi yang dilaksanakan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	d) Pelaksanaan Pelantikan, Pelepasan, dan Persiapan Pemberangkatan Penugasan Khusus Secara Tim	Kegiatan Pelaksanaan Pelantikan, Pelepasan, dan Persiapan Pemberangkatan Penugasan Khusus Secara Tim	1 Dokumen
	e) Pelaksanaan Penempatan	Pelaksanaan Penempatan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	600 Orang
	f) Pelaksanaan Pemulangan Tim	Pelaksanaan Pemulangan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim yang telah purna (berakhir masa tugasnya)	894 Orang
	g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Penugasan Khusus	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	h) Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penugasan Khusus secara Tim	Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi yang dilaksanakan bagi peserta Penugasan Khusus secara Tim pada tahun pertama penugasan	1 Dokumen
2.	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan yang baru ditempatkan dan peserta yang berakhir masa tugasnya, pada	4.177 Orang

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	secara individu	penugasan khusus secara individu	
	a) Pelaksanaan Persiapan dan Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Persiapan dan Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	b) Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Kegiatan Rekrutmen dan Seleksi yang dilaksanakan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	c) Pelaksanaan Penempatan	Pelaksanaan Penempatan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individu	2.000 Orang
	d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Penugasan Khusus	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	e) Pelaksanaan Pemulangan Individu	Pelaksanaan Pemulangan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu yang telah purna (berakhir masa tugasnya)	2.334 Orang
3.	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan yang baru ditempatkan dan peserta yang berakhir masa tugasnya, pada penugasan khusus secara tim serta individu di Papua, Papua Barat	395 Orang
	<u>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim</u>		
	a) Pelaksanaan Persiapan dan Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Persiapan dan Koordinasi pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
	b) Pelaksanaan Penempatan	Pelaksanaan Penempatan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Tim di Papua dan Papua Barat	48 orang

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individu			
	a) Pelaksanaan Penempatan	Pelaksanaan Penempatan pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Individu di Papua dan Papua Barat	52 Orang
	b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Penugasan Khusus	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lintas Program Pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	1 Dokumen

2.2.3 Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri

1. Tujuan

Pendayagunaan SDM Kesehatan luar negeri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan luar negeri dan meningkatnya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA).

2. Sasaran.

- a. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri (TKKI)

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah SDM Kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke Luar Negeri	SDM Kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke Luar negeri	300 Orang
	a) Jumlah dokumen Identifikasi Peluang dan Monev Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri	Dokumen Identifikasi Peluang dan Monev Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri	1 Dokumen
	b) Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pendayagunaan TKKI ke Luar Negeri	Dokumen kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pendayagunaan TKKI ke Luar Negeri	1 Dokumen
	c) Jumlah Tenaga Kesehatan Indonesia	Tenaga Kesehatan Indonesia yang	300 Orang

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	yang didayagunakan ke Luar Negeri	didayagunakan ke Luar Negeri	
	d) Jumlah dokumen Sosialisasi Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	Dokumen Sosialisasi Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	1 Dokumen
	e) Jumlah dokumen Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	Dokumen Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	1 Dokumen
	f) Jumlah dokumen kegiatan Reviu Implementasi Project Kerjasama Kemkes - JICA	Dokumen kegiatan Reviu Implementasi Project Kerjasama Kemkes - JICA	1 Dokumen
	g) Jumlah dokumen Pemenuhan Pasar Kerja Tenaga Kesehatan di Tingkat Global	Dokumen Pemenuhan Pasar Kerja Tenaga Kesehatan di Tingkat Global	1 Dokumen

c. Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK-WNA)

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Jumlah SDM K WNA yang didayagunakan dan dibina di Indonesia	Seluruh SDM K WNA yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan di Indonesia	50 Orang
	a) Jumlah TKWNA yang didayagunakan dan dibina di Indonesia	Seluruh TKWNA yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan di Indonesia	50 Orang
	b) Jumlah dokumen bahan/rancangan kebijakan teknis terkait dengan pendayagunaan SDM K WNA	Dokumen bahan/rancangan kebijakan teknis terkait dengan pendayagunaan SDM K WNA	1 Dokumen
	c) Jumlah dokumen rencana pendayagunaan SDM K WNA	Dokumen rencana pendayagunaan SDM K WNA pada tahun berikutnya	1 Dokumen

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	d) Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendayagunaan SDM K WNA tingkat bilateral/regional/multilateral	Laporan hasil pertemuan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendayagunaan SDM K WNA tingkat bilateral/regional/multilateral	1 Dokumen
	e) Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan ASEAN Healthcare Services Website	Laporan kegiatan pengelolaan/updating informasi dalam ASEAN Healthcare Services Website	1 Dokumen

2.2.4 Sub Bagian Tata Usaha

1. Tujuan

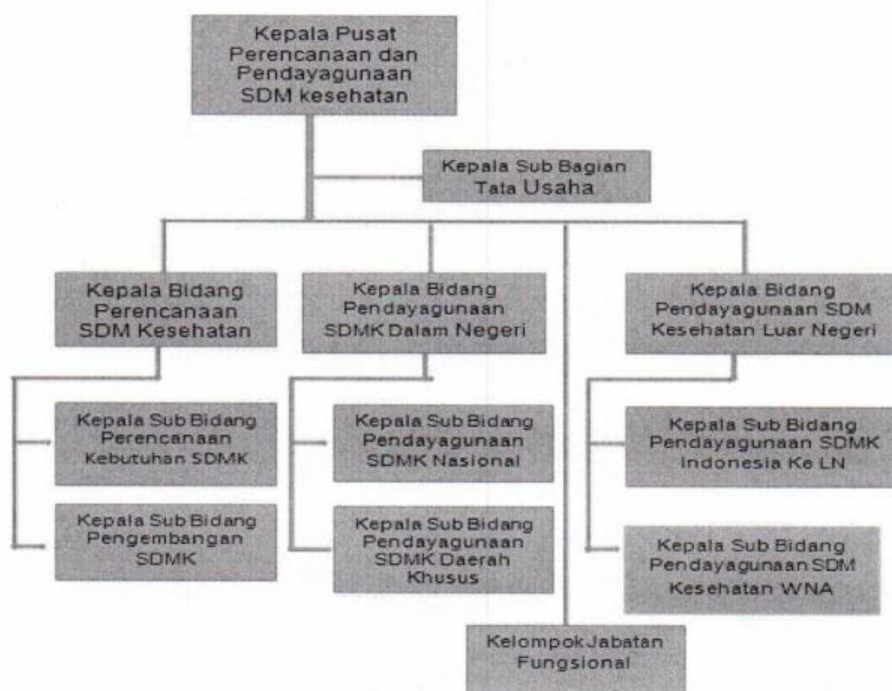
Terlaksananya ketatausahaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

2. Sasaran

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal satker	1 Layanan
	a) Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Perangkat pengolah data dan komunikasi yang diadakan	1 Layanan
	b) Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Peralatan dan fasilitas perkantoran yang diadakan	1 Layanan
2.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Dokumen perencanaan program dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan pemantauan dan evaluasi yang disusun.	1 Dokumen
	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun	Dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun	1 Dokumen
	b) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	Dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	1 Dokumen
	c) Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen

No	Indikator Output/Indikator Komponen	Definisi Operasional	Target Tahun 2020
	d) Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen kepegawaian yang disusun	1 Dokumen
3.	Layanan Perkantoran	Realisasi Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan

Bagan Struktur Pusren-Gun SDM Kesehatan



2.3 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas Gambar 4.1 Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum dikelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan akses terhadap air minum dan sanitasi masing-masing sebesar 61,29 persen dan 74,58 persen (BPS, 2018).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Prioritas Kemenkes pada Renstra Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Penurunan Stunting
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
4. Pengembangan Industri Kesehatan

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN

3.1. VISI dan MISI

Teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L disusun dengan menyelaraskan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke dalam dokumen Renstra K/L, menurut Bappenas sebagai berikut:

- a. Visi: **“Kementerian Kesehatan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**
- b. Misi: **“ Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden.**

3.2. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024

Sasaran, target dan indikator pembangunan manusia tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 terkait SDM Kesehatan yaitu :

Tabel 3.1.
Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia

No	Indikator	Baseline	Target
1.	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23% (Kemkes, 2018)	83%
2.	Persentase puskesmas tanpa dokter	15% (Kemkes, 2018)	0%

3.3. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015 – 2019

Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024 memuat tujuan, sasaran strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan pada tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024 menunggu disahkannya Renstra Kemenkes 2020-2024.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Program PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase puskesmas tanpa dokter	12	9	6	3	0
2.	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83
3.	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	70	75	80	85	90
4.	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	41.669	39.627	40.275	40.437	40.585

3.4. RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDM TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Tahun 2020-2024 merupakan rencana kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh bidang di lingkungan Pusren-Gun SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Tahun 2020-2024 menunggu disahkannya Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024.

3.5. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2020 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2020 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Pusren-Gun SDM Kesehatan Tahun 2020.

ef

Tabel 3.2.
Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2020

	Output	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Pelaksana
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			
2078.503	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang	643.500.000	Bidang Pendayagunaan SDM Dalam Negeri
2078.601	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	5 Dokumen	4.502.075.000	Bidang Perencanaan SDM Kesehatan
2078.602	Pendayagunaan SDM Luar Negeri	350 orang	5.043.103.000	Bidang Pendayagunaan SDM Luar Negeri
2078.603	Penugasan Tenaga Kesehatan secara Tim	1.356 orang	50.457.300.000	Bidang Pendayagunaan SDM Dalam Negeri
2078.604	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	395 orang	4.677.688.000	Bidang Pendayagunaan SDM Dalam Negeri
2078.605	Pendayagunaan Dokter Spesialis	660 orang	13.066.326.000	Bidang Perencanaan SDM Kesehatan
2078.606	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	40 orang	1.280.400.000	Bidang Perencanaan SDM Kesehatan
2078.607	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Individu	4.177 orang	43.220.598.000	Bidang Pendayagunaan SDM Dalam Negeri
2078.608	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	1 dokumen	426.185.000	Bidang Perencanaan SDM Kesehatan
2078.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	285.807.000	Subbagian Tata Usaha
2078.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	2.427.067.000	Subbagian Tata Usaha
2078.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	2.821.105.000	Subbagian Tata Usaha
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan			
5234.001	Internsip Dokter	12.000 orang	614.616.832.000	Bidang Pendayagunaan SDM Nasional

3.6. PERJANJIAN KINERJA 2020

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun 2019. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun anggaran 2020 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	Jumlah kumulatif penempatan tenaga kesehatan baru dan purna (yang berakhir masa tugasnya) pada penugasan khusus secara tim, individu dan penugasan khusus secara tim serta individu di Papua, Papua Barat	5.928 orang
2	Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang
3	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang di dayagunakan	Jumlah lulusan pendidikan Dokter Spesialis yang didayagunakan	700 orang
4	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	5 dokumen
5	Jumlah Pendayagunaan SDM Luar Negeri	Jumlah Pendayagunaan SDM Luar Negeri	350 orang
6	Internsip Dokter	Jumlah dokter yang melaksanakan internsip	12.000 orang

3.7. KEBUTUHAN ANGGARAN.

Rencana Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan bersumber APBN, yang anggarannya terdiri atas 2 (dua) fungsi, yaitu anggaran fungsi kesehatan dan anggaran fungsi pendidikan. Anggaran fungsi kesehatan digunakan untuk mendukung capaian indikator jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasyankes. Sedangkan anggaran fungsi pendidikan untuk mendukung capaian indikator jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip. Kegiatan perencanaan dan pendayagunaan di provinsi juga didanai APBN melalui anggaran dekonsentrasi.

ef

Tabel 3.4.

Alokasi Anggaran Pusren-Gun SDM Kesehatan Tahun 2020

Kode Output	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	128.851.154.000
5234	Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	614.616.832.000
Jumlah		743.467.986.000

BAB 4

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kinerja Kegiatan/Tahunan (RKT) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020 ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan bagi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan monitoring untuk menjamin keselarasan kegiatan dan tercapainya target. Pelaksanaan monitoring dilakukan per triwulan untuk kemudian dilakukan evaluasi dan ditentukan tindak lanjutnya.

4.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target.

Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan.

4.2. Evaluasi

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2020 ini merupakan dokumen acuan dalam penyusunan kegiatan pertahun di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dokumen ini juga dapat dijadikan acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi terkait dokumen RKT ini dapat dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap dokumen diatasnya

5.2. Penutup

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk masukan dan saran dapat menghubungi Sub Bagian Tata Usaha Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

df

Lampiran



DS:9160-5902-1948-0885

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 024.12.1.626320/2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
- Sebesar : Rp. 743.467.986.000 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- 1. Rupiah Murni
- 2. PNBP

PNBP TA Berjalan

- 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA VII

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

Rp.	743.467.986.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(182) Rp.			
	743.467.986.000			

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020

Satker	: (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN		
07	KESEHATAN	Rp.	128.851.154.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	128.851.154.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	614.516.832.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	614.516.832.000



LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020

Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN		
10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Rp. 743.467.986.000
10.2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Rp. 128.851.154.000
10.5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Rp. 614.616.832.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
I A. INFORMASI KINERJA



DS 9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Maxi Rein Rondonuwu,DHSM,MARS
Bendahara Pengeluaran : Rika Puspita Budhiarsih, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dodi Badarianto, SKM

		Halaman : I A. 1	
1	Fungsi	07	KESEHATAN
	Sub Fungsi	07.90	KESEHATAN LAINNYA
		10	PENDIDIKAN
		10.06	PENDIDIKAN TINGGI
2	Program	024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
	Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
	IKU Program	01	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
		02	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
		03	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
	Kegiatan	2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokter Residen yang Ditempatkan Dalam Rangka Penugasan Khusus Residen di Rumah Sakit
		01	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
		01	Jumlah Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis Baru yang Menjalani WKS
		01	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Ditempatkan Secara Team Based Minimal 5 orang
		01	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu Fasyankes
	Keluaran (Output)	2078.503	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)
		2078.601	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
		2078.602	Pendayagunaan SDM Luar Negeri
		2078.603	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim
		2078.604	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat
		2078.605	Pendayagunaan Dokter Spesialis
		2078.606	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat
		2078.607	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu
		2078.608	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota
		2078.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
		2078.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker
			100,00 Orang
			5,00 Dokumen
			350,00 orang
			1.356,00 Orang
			395,00 Orang
			660,00 Orang
			40,00 Orang
			4.177,00 Orang
			1,00 dokumen
			1,00 Layanan
			1,00 Layanan
			643.500.000
			4.502.075.000
			5.043.103.000
			50.457.300.000
			4.677.688.000
			13.066.326.000
			1.280.400.000
			43.220.598.000
			426.185.000
			285.807.000
			2.427.067.000
			128.851.154.000
			128.851.154.000
			614.616.832.000
			614.616.832.000
			743.467.986.000
			128.851.154.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
I A. INFORMASI KINERJA



DS.9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Maxi Rein Rondonuwu,DHSM,MARS
Bendahara Pengeluaran : Rika Puspita Budhiarsih, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dodi Badarianto, SKM

			1,00 Layanan	2.821.105.000
				614.616.832.000
			12.000.00 Orang	614.616.832.000

Halaman : I A, 2

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS3160-9902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626320	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	-	742.854.944	613.042	-	-	743.467.986		
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	-	742.854.944	613.042	-	-	743.467.986		
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	-	128.338.112	513.042	-	-	128.851.154		
2078.503	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	-	599.465	44.035	-	-	643.500	01 . 51	
01 RM		-	599.465	44.035	-	-	643.500	182@	
2078.601	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	-	4.417.075	85.000	-	-	4.502.075	01 . 51	
01 RM		-	4.417.075	85.000	-	-	4.502.075	182@	
2078.602	Pendayagunaan SDMK Luar Negeri	-	5.043.103	-	-	-	5.043.103	01 . 51	
01 RM		-	5.043.103	-	-	-	5.043.103	182@	
2078.603	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	-	50.409.100	48.200	-	-	50.457.300	01 . 51	
01 RM		-	50.409.100	48.200	-	-	50.457.300	182@	
2078.604	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	-	4.677.688	-	-	-	4.677.688	01 . 51	
01 RM		-	4.677.688	-	-	-	4.677.688	182@	
2078.605	Pendayagunaan Dokter Spesialis	-	13.016.326	50.000	-	-	13.066.326	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS 9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM	-	-	13.016.326	50.000	-	-	13.066.326	182@	-
2078.606	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	-	1.280.400	-	-	-	1.280.400	01 . 51	-
01 RM	-	-	1.280.400	-	-	-	1.280.400	182	-
2078.607	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	-	43.220.598	-	-	-	43.220.598	01 . 51	-
01 RM	-	-	43.220.598	-	-	-	43.220.598	182@	-
2078.608	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota	-	426.185	-	-	-	426.185	01 . 51	-
01 RM	-	-	426.185	-	-	-	426.185	182@	-
2078.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	285.807	-	-	285.807	01 . 51	-
01 RM	-	-	-	285.807	-	-	285.807	182	-
2078.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	2.427.067	-	-	-	2.427.067	01 . 51	-
01 RM	-	-	2.427.067	-	-	-	2.427.067	182	-
2078.994	Layanan Perkantoran	-	2.821.105	-	-	-	2.821.105	01 . 51	-
01 RM	-	-	2.821.105	-	-	-	2.821.105	182	-
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	-	614.516.832	100.000	-	-	614.616.832	-	-

DAFTAR ISI

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Saiker
: (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)



KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5234.501	Internship Dokter	-	614.516.832	100.000	-	-	614.616.832	01. 51	
01 RM		-	614.516.832	100.000	-	-	614.616.832	182@	
	JUMLAH	-	742.854.944	613.042	-	-	743.467.986		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

a.d. MENTERI KESEHATAN

SEKRETARIS JENDERAL

tttd.

dr. Oscar Primadi, MPH

NIP 196110201988031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS 9160-5902-1948-0685

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Halaman : III, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	626320	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	6.837.034	15.172.714	26.616.913	40.733.938	42.815.029	47.575.136	82.585.217	80.363.935	87.132.196	88.902.330	99.541.073	125.190.469	743.467.986
		52 BELANJA BARANG	6.834.726	15.155.260	26.595.997	40.711.191	42.791.325	47.545.916	82.536.739	80.308.025	87.068.460	88.851.431	99.474.972	125.030.902	742.904.944
		53 BELANJA MODAL	2.308	17.454	22.916	22.747	23.704	29.222	48.478	55.910	63.736	50.899	66.101	159.567	563.042
		Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	1.182.559	2.634.531	4.615.630	7.052.936	7.413.099	8.239.661	14.301.287	13.923.855	15.099.103	15.394.157	17.243.879	21.750.457	128.851.154
024.12.10.5234		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.180.251	2.617.077	4.592.714	7.030.189	7.389.395	8.210.439	14.252.809	13.867.945	15.035.367	15.343.258	17.177.778	21.590.890	128.288.112
		53 BELANJA MODAL	2.308	17.454	22.916	22.747	23.704	29.222	48.478	55.910	63.736	50.899	66.101	159.567	563.042
		Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	5.654.475	12.538.183	22.003.283	33.681.002	35.401.930	39.335.477	68.283.930	66.440.080	72.033.093	73.508.173	82.297.194	103.440.012	614.616.832
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.654.475	12.538.183	22.003.283	33.681.002	35.401.930	39.335.477	68.283.930	66.440.080	72.033.093	73.508.173	82.297.194	103.440.012	614.616.832

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201938031013

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
IV. C A T A N



DS 9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Salter : [626320] PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
626320	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN		2078.602	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)	
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan			Tidak Dapat Dicairkan	
	Rp. 25.901.075			Data dukung belum lengkap	
	Rp. 25.673.840			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
024.12.10 2078	52 Belanja Barang		2078.603	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)	
	Rp. 227.235			Tidak Dapat Dicairkan	
	53 Belanja Modal			Data dukung belum lengkap	
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
2078.503	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		2078.601	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)			Tidak Dapat Dicairkan	
	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)			Belum ada dasar hukum	
	Rp. 44.035			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
2078.601	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan		2078.602	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
	521211 Belanja Bahan(RM)			Tidak Dapat Dicairkan	
	Rp. 2.000			Belum ada dasar hukum	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
2078.601	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		2078.603	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan			Tidak Dapat Dicairkan	
	Belum ada dasar hukum			Belum ada dasar hukum	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
2078.601	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		2078.601	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	
	Rp. 235.500			521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan			Tidak Dapat Dicairkan	
	Belum ada dasar hukum			Belum ada dasar hukum	
2078.601	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		2078.601	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Tidak Dapat Dicairkan	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			Belum ada dasar hukum	
	Rp. 610.940			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
2078.601	Tidak Dapat Dicairkan		2078.601	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Belum ada dasar hukum			Tidak Dapat Dicairkan	
	Rp. 1.407.500			Belum ada dasar hukum	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
IV. C A T A N



DS-9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [626320] PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Halaman : IV. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
2078.604	Disposisi: 522191	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum	2078.607	Data dukung belum lengkap Disposisi: 524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
	Disposisi: 524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum		Disposisi: 524114	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
	Disposisi: 524119	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum		Disposisi: 521211	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
	Disposisi: 536111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Modal Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Data dukung belum lengkap		Disposisi: 522131	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
	Disposisi: 524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum		Disposisi: 522151	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
2078.605	Disposisi: 524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Pendayagunaan Dokter Spesialis Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum	2078.608	Disposisi: 524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicalirkan Belum ada dasar hukum
	Disposisi: 536111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Modal Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicalirkan		Disposisi: 524113	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 024.12.1.626320/2020
IV. C A T A T A N



DS 9160-5902-1948-0885

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Saker : [626320] PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Halaman : IV. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 5234.501 Internsip Dokter	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum	Rp.	3.300	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	524114	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	524114	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Data dukung belum lengkap	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait	Rp.	50.000	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	522141	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	522151	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait	Rp.	22.400	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	522141	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	522151	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait	Rp.	54.000	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	522141	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	522151	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait	Rp.	2.006.328	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	524114	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait	Rp.	478.442	Disposisi: 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum
	524114	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			
	Disposisi:	Tidak Dapat Dicairkan Belum ada dasar hukum			
	524119	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dari/atau dokumen terkait			

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013